



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281  
Telepon (0274) 586168 Hunting, Fax (0274) 565500  
Laman: uny.ac.id E-mail: humas@uny.ac.id

---

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG  
KODE ETIK DOSEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dosen Universitas Negeri Yogyakarta sebagai anggota masyarakat kampus selalu mendapat perhatian banyak pihak termasuk masyarakat sekitar Kampus, dikarenakan Kampus sebagai menara air merupakan pusat tolok ukur keberhasilan pembangunan bangsa dan negara yang beradab dan bermoral;
- b. bahwa dosen dalam pembangunan bangsa dan negara memiliki peran penting untuk menghasilkan generasi penerus yang profesional dan bermoral;
- c. bahwa dalam menghasilkan generasi penerus yang profesional dan bermoral, dosen harus dapat menjadi panutan yang tercermin dalam perilakunya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kode Etik Dosen Universitas Negeri Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang RI Nomor: 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 248);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 279);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KODE ETIK DOSEN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Yogyakarta yang selanjutnya disingkat UNY adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Rektor UNY.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Kode Etik adalah tatanan etika yang telah disepakati sebagai pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan.
5. Kode etik dosen adalah pola aturan sebagai pedoman berperilaku dosen dalam melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi, baik sebagai pendidik profesional maupun sebagai ilmuwan.
6. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
8. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
9. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
10. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.
11. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa

### BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

#### Pasal 2

Peraturan Rektor ini ditetapkan dengan maksud untuk mengatur kewajiban dan tanggung jawab dosen UNY agar dalam bertindak sesuai dengan cara-cara yang

profesional dan bermoral, baik secara umum sebagai anggota masyarakat maupun secara khusus sebagai dosen, sebagai pegawai negeri sipil atau non-pegawai negeri sipil dan anggota sivitas akademika UNY.

### Pasal 3

Tujuan kode etik dosen UNY untuk mewujudkan perilaku dosen UNY yang jujur, adil, profesional dan berbudaya.

### Pasal 4

- (1) Kode etik dosen UNY berfungsi sebagai pedoman bagi dosen UNY dalam menjalankan profesinya, baik sebagai pegawai negeri sipil atau non-pegawai negeri sipil maupun sebagai anggota civitas akademika UNY dan anggota masyarakat serta sebagai sarana kontrol masyarakat terhadap pelaksanaan profesi dosen UNY;
- (2) Kode etik dosen yang menjadi dasar berperilaku dosen dalam melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi, baik sebagai pendidik profesional maupun sebagai ilmuwan meliputi:
  - a. Kemanfaatan;
  - b. Kejujuran;
  - c. Kesungguhan;
  - d. Keikhlasan;
  - e. Ketulusan;
  - f. Kesejawatan;
  - g. Kebersamaan; dan
  - h. Tanggung jawab.

## BAB III KEWAJIBAN DOSEN Bagian Kesatu Kewajiban Umum

### Pasal 5

Setiap dosen UNY harus menjalankan kewajiban:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. menjunjung tinggi harkat dan martabat dosen serta melaksanakan sumpah/janji jabatan sebagai dosen;
- c. melaksanakan profesinya sesuai standar nasional yang berlaku;
- d. menjaga integritas dan perilaku sesuai tata krama masyarakat setempat;
- e. berperilaku yang dapat diteladani, bersikap jujur, objektif, bersemangat, bertanggung jawab serta menghindarkan diri dari ucapan, tulisan dan perilaku tercela;
- f. saling menghormati dan menjunjung tinggi kesepakatan kerjasama dalam bekerjasama dengan pejabat dan/atau anggota masyarakat lainnya;
- g. menjaga hubungan baik dengan anggota masyarakat di lingkungannya dengan berperilaku yang sopan dan bertutur kata yang santun;
- h. melaksanakan kepemimpinan dengan berpedoman pada prinsip *ing ngarso sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani*;
- i. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan penuh kesadaran.

## Bagian Kedua Kewajiban Khusus

### Pasal 6

Setiap dosen UNY dalam menjalankan tugas sebagai dosen harus:

- a. menjunjung tinggi Visi dan Misi UNY ;
- b. menjaga kewibawaan dan nama baik almamater UNY;

- c. melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi;
- d. menjaga harga diri dalam menjalankan profesinya dengan tetap menjunjung tinggi moralitas dosen;
- e. profesional sesuai bidang keahliannya;
- f. tidak melakukan tindakan plagiat;
- g. membocorkan rahasia kegiatan akademik, seperti mempublikasikan penemuan atau hasil penelitian yang belum waktunya untuk diketahui umum;
- h. tidak melakukan fabrikasi, yakni memalsukan atau menyalahgunakan data dalam kegiatan akademis;
- i. tidak menghalangi akses kepada mahasiswa dalam proses pendidikan dan penelitian;
- j. menjaga hubungan baik dengan atasan, teman sejawat, tenaga administrasi dan mahasiswa;
- k. mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
- l. menghargai saran dan pendapat atas karya ilmiahnya;
- m. mengembangkan karier akademik semaksimal mungkin sesuai bidang keahliannya atau rumpun ilmunya melalui kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi;
- n. meningkatkan jenjang pangkat dan jabatan semaksimal mungkin sesuai bidang keahliannya;
- o. menghindari penyalahgunaan wewenang sebagai pendidik untuk kepentingan pribadi dan pihak lain;
- p. memotivasi semangat kerja, memberi keteladanan dan memberdayakan dosen junior dan/atau mahasiswa bimbingannya dalam mengembangkan karier dan/atau bidang keahliannya;
- q. melakukan pengembangan ilmu pengetahuan sesuai bidang keahliannya melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB IV  
TANGGUNGJAWAB DOSEN  
Bagian Kesatu  
Tanggungjawab Umum

Pasal 7

Setiap dosen UNY memiliki tanggungjawab:

- a. berani menanggung segala resiko secara pribadi atas segala perilaku dan perbuatan yang dilakukannya berkaitan profesinya sebagai dosen;
- b. menjaga kerahasiaan data yang terkait dengan tugas jabatan yang diembannya sesuai profesinya;
- c. mewakili pribadi dan institusi tempatnya bekerja dengan menunjukkan profesionalitasnya;
- d. menjaga nama baik lembaga atau institusi tempatnya bekerja;

Bagian Kedua  
Tanggungjawab Khusus

Pasal 8

Setiap dosen UNY sesuai bidang keahliannya memiliki tanggungjawab atas:

- a. keaslian atas karya ilmiah yang dihasilkannya;
- b. profesi yang dijalankannya sesuai bidang keahliannya;
- c. resiko yang terjadi jika melakukan plagiat.
- d. karya ilmiah atau hasil ciptaannya dengan penuh pertimbangan secara profesional.
- e. tindakan dan kebijakan yang dilakukan berhubungan dengan profesinya sebagai dosen di bidang keahliannya.
- f. akibat dari kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang telah dilaksanakannya.

## BAB V PELANGGARAN KODE ETIK DOSEN

### Pasal 9

Pelanggaran ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 merupakan pelanggaran Kode Etik Dosen,

### Pasal 10

Pelanggaran Kode Etik Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berpengaruh terhadap proses kenaikan pangkat dan jabatan dosen pelaku pelanggaran.

### Pasal 11

- (1) Pelanggaran kode etik dosen yang dilakukan oleh seorang atau lebih dosen UNY yang berasal dari berbagai fakultas secara bersama-sama dan/atau merugikan nama baik UNY disebut sebagai pelanggaran kode etik tingkat universitas.
- (2) Pelanggaran kode etik dosen yang dilakukan oleh dosen UNY yang berasal dari fakultas dan/atau merugikan nama baik fakultas yang bersangkutan disebut sebagai pelanggaran kode etik tingkat fakultas.

## BAB VI MAJELIS ETIK

### Pasal 12

- (1) Majelis Etik dibentuk dan ditetapkan oleh Rektor baik untuk tingkat Universitas, dan dibentuk dan ditetapkan oleh Dekan untuk tingkat fakultas.
- (2) Majelis Etik bertugas menerima pengaduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran, memeriksa dan menjatuhkan putusan atas pelanggaran kode etik dosen.
- (3) Dalam hal pelanggar kode etik dosen menyadari, mengakui dan menyesali pelanggaran yang dilakukan dan belum ada pemeriksaan atas pelanggaran itu, Majelis Etik dapat melakukan pembinaan terhadap pelanggar dengan memperhatikan tata cara pembinaan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan kepegawaian.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi putusan yang dijatuhkan Majelis Etik.

### Pasal 13

- (1) Majelis Etik dibentuk di tingkat fakultas dan universitas setelah Dekan atau Rektor menerima pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik dosen.
- (2) Majelis Etik Fakultas terdiri atas:
  - a. Seorang Ketua merangkap anggota;
  - b. Seorang Sekretaris merangkap anggota;
  - c. 3 (tiga) orang Anggota.
- (3) Majelis Etik Fakultas dijabat oleh 5 (lima) anggota Senat Fakultas terdiri atas 3 (tiga) orang profesor dan 2 (dua) orang bukan professor.
- (4) Majelis Etik Universitas terdiri atas:
  - a. Seorang Ketua merangkap anggota;
  - b. Seorang Sekretaris merangkap anggota;
  - c. 3 (tiga) orang Anggota.
- (5) Majelis Etik Universitas dijabat oleh 5 (lima) anggota Senat Universitas yang berjabatan professor.

### Pasal 14

- (1) Majelis Etik Fakultas yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dinyatakan bubar setelah menyerahkan laporan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik dosen kepada Dekan.

- (2) Majelis Etik Universitas yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dinyatakan bubar setelah menyerahkan laporan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik dosen kepada Rektor.

#### Pasal 15

Rektor dapat membentuk Majelis Etik Khusus untuk tugas memeriksa pelanggaran Kode Etik Dosen yang dilakukan oleh Dosen yang mendapat tugas tambahan dosen.

### BAB VII

#### TATA CARA PEMANGGILAN DAN PEMERIKSAAN PELANGGARAN KODE ETIK DOSEN

#### Pasal 16

- (1) Pemanggilan dan pemeriksaan dilakukan oleh Majelis Etik atas dasar pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Dosen kepada Rektor atau Dekan.
- (2) Berdasar pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak adanya pengaduan dan/atau laporan, Rektor atau dekan membentuk Majelis Etik.
- (3) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak dibentuknya Majelis Etik, Majelis Etik melakukan pemanggilan kepada setiap orang untuk didengar keterangannya terkait adanya pelanggaran kode etik dosen.
- (4) Proses untuk mendengar keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- (5) Berdasar keterangan sebagai hasil pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam waktu paling lama 6 (enam) hari terhitung sejak selesainya waktu proses pemanggilan, Majelis Etik memanggil terduga pelanggar kode etik dosen untuk diperiksa atas dugaan pelanggaran yang dilakukannya.
- (6) Sekretaris Majelis Etik membuat berita acara pelaksanaan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen dan ditandatangani oleh Majelis Etika dan pelanggar Kode Etik Dosen.

#### Pasal 17

Pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Dosen oleh Majelis Etik dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum.

#### Pasal 18

Dosen pelanggar Kode Etik Dosen diberi kesempatan menyampaikan pembelaan saat sidang pemeriksaan.

#### Pasal 19

Pada saat sidang pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Dosen, Majelis Etik dapat memanggil saksi ahli untuk dimintai keterangannya.

#### Pasal 20

Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak saat dimulainya pemeriksaan, Majelis Etik Fakultas harus sudah menghasilkan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Dosen berupa data pertimbangan yang akan disampaikan ke Senat Fakultas melalui rapat pleno untuk dijatuhkan putusan.

#### Pasal 21

Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak saat dimulainya pemeriksaan, Majelis Etik Universitas harus sudah menghasilkan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Dosen berupa data pertimbangan yang akan disampaikan ke Senat Universitas melalui rapat pleno untuk dijatuhkan putusan.

BAB VIII  
PUTUSAN PELANGGARAN KODE ETIK DOSEN

Pasal 22

- (1) Putusan atas pelanggaran kode etik dosen tingkat fakultas dijatuhkan oleh Senat Fakultas dalam suatu rapat pleno.
- (2) Putusan atas pelanggaran kode etik dosen tingkat universitas dijatuhkan oleh Senat Universitas dalam suatu rapat pleno.
- (3) Putusan Senat Fakultas atau Senat Universitas dapat berupa:
  - a. Telah terjadi pelanggaran Kode Etik Dosen yang berdampak pada sanksi kepegawaian pelaku pelanggaran.
  - b. Telah terjadi pelanggaran Kode Etik Dosen yang tidak berdampak pada sanksi kepegawaian pelaku pelanggaran.
  - c. Telah terjadi pelanggaran Kode Etik Dosen karena ketidaksengajaan dan pelaku pelanggaran menandatangani pernyataan permintaan maaf dan tidak akan mengulang lagi.
  - d. Tidak terjadi pelanggaran Kode Etik Dosen.

Pasal 23

- (1) Putusan Senat Fakultas atau Senat Universitas tentang pelanggaran Kode Etik Dosen merupakan putusan yang bersifat final.
- (2) Atas dasar putusan Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dekan dapat menjatuhkan sanksi kepada dosen yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dosen.
- (3) Atas dasar putusan Senat Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat menjatuhkan sanksi kepada dosen yang terbukti melakukan pelanggaran etika dosen

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kode Etik Dosen dan Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kode Etik Dosen, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 17 Oktober 2019  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

☞ SUTRISNA WIBAWA  
☞ NIP195909011986011002 ✓